



Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan 71662
Email : Inspektoratblg@gmail.com



Daftar isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	v
Kata Pengantar.....	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Inspektorat	2
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
A. Perencanaan Kinerja Berdasarkan RENSTRA Periode Tahun 2016-2021.....	10
B. Perencanaan Kinerja Inspektorat Berdasarkan RENSTRA Periode 2021-2026.....	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	41
A. Akuntabilitas Kinerja Berbasis Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021..	41
B. Akuntabilitas Kinerja Berbasis Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021- 2026.....	77
Bab IV Penutup	102

DAFTAR TABEL

1. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2.1)	4
2. Data PNS berdasarkan Kepangkatan (2.2)	5
3. Data PNS berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional (2.3)	6
4. Data PNS berdasarkan latihan jabatan (2.4)	7
5. Rincian Nilai Aset Inspektorat per Tanggal 31 Desember 2021 (2.5)	8
6. Tabel target indikator tujuan Tahun 2016 – 2021 (2.6)	10
7. Tabel Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA Inspektorat Tahun 2016-2021 (2.7)	11
8. Tabel RENSTRA Inspektorat Tahun 2016-2021 (2.8)	12
9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pada tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (2.9)	14
10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 – 2021 (2.10)	19
11. Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2021 (2.11)	20
12. Target dan indikator tujuan Inspektorat Tahun 2021-2026 (2.12)	22
13. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Tahun 2021-2026 (2.13)	23
14. Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (2.14)	25
15. Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2021 (2.15)	27
16. Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja strategis (2.16)	32
17. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021 (2.17)	35
18. Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan (2.18)	37
19. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III Inspektorat Kabupaten Balangan (2.19)	38
20. Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Balangan (2.20)	38

21. Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian (2.21)	39
22. Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (2.22)	40
23. Kategorisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Capaian Rata – Rata atas Indikator Kinerja (3.1)	42
24. Pengukuran Kinerja Tujuan dan Indikator Tujuan Akhir RENSTRA 2016-2021 (3.2)	42
25. Capaian Indikator Kinerja Utama (3.3)	45
26. Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2016-2021 (3.4)	49
27. Capaian Kinerja Inspektur (3.5)	50
28. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 (3.6)	60
29. Data Laporan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan (3.7)	61
30. Capaian Kinerja (3.8)	62
31. Capaian Kinerja Tahun 2021 (3.9)	63
32. Capaian Kinerja Sasaran Program Eselon Inspektur Pembantu Wilayah I,II dan III (3.10)	63
33. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Untuk Eselon IV Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan (3.11)	65
34. Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2020 (3.12)	76
35. Pengukuran Kinerja Tujuan dan Indikator Tujuan Akhir RENSTRA 2016-2021 (3.13)	77
36. Capaian Indikator Kinerja Utama / Eselon II (3.14)	78
37. Penilaian Kapabilitas APIP (3.15)	82
38. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Perwakilan Kalimantan Selatan (3.16)	87
39. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021 (3.17)	88
40. Capaian Kinerja Sasaran Program Sekretaris (3.18)	89
41. capaian kinerja sasaran Irbanwil I (3.19)	90
42. capaian kinerja sasaran Irbanwil II (3.20)	92
43. capaian kinerja sasaran Irbanwil III (3.21)	94
44. capaian kinerja sasaran Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi (3.22)	96
45. capaian kinerja sasaran Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (3.23)	98

DAFTAR GRAFIK

1. Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP	47
2. Capaian Kinerja Prosentase SKPD Yang Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal BB (Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021)	53
3. Capaian Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Periode Tahun 2016-2021	54
4. Perbandingan Capaian Kinerja Level Kapabilitas APIP	57

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2021 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Februari 2022

Inspektur,



Erwan Mega Karva Latief, SKM.M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19700510 199501 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat , Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini karena merupakan masa transisi dimana RENSTRA Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 telah habis masa periodenya sampai Agustus 2021 dan telah ditetapkan RENSTRA 2021-2026 yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sehingga hasil pengukuran kinerja dibagi dalam 2 (dua) capaian kinerja dengan Indikator yang berbeda pula yakni :

1. Capaian kinerja akhir RENSTRA 2016-2021
2. Capaian Kinerja tahun pertama RENSTRA 2021-2026

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 berbasis Renstra 2016-2021 Inspektorat dapat dikatakan berhasil. Berikut ini merupakan hasil capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2021:

47. Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB, target kinerja 50% terealisasi sebesar 45% dengan capaian 90% atau dengan kategori Tinggi.
48. Prosentase rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti, target kinerja 95% terealisasi 90% dengan capaian sebesar 94% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.
49. Prosentase rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, target kinerja 95% terealisasi 87% dengan capaian sebesar 91% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.
50. Prosentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3, target kinerja 225 terealisasi 0 dengan capaian sebesar 0% atau dengan kategori **Sangat Rendah**.
51. Level kapabilitas APIP, target kinerja level 3 terealisasi level 3 dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.

52. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.
53. Nilai/predikat akuntabilitas kinerja Inspektorat, target kinerja BB(71) terealisasi BB (73,03) dengan capaian sebesar 102% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Renstra 2021-2026 Inspektorat terdapat 2 (empat) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021. Berikut ini merupakan hasil capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2021:

1. Level Maturitas SPIP, dari target kinerja Level 3 (3,023) dapat terealisasi 3 (3,023) dengan capaian sebesar 100 % atau dalam kategori sangat tinggi.
2. Level kapabilitas APIP, dari target kinerja Level 3 dapat terealisasi Level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau dalam kategori sangat tinggi.
3. Indeks Integritas, dari target kinerja 78 dapat terealisasi 76,52 dengan capaian kinerja sebesar 98 % atau dalam kategori sangat tinggi.
4. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM, dari target kinerja WBK 1 unit kerja dan WBBM 1 unit kerja, realisasi WBK 0 WBBM 0 dengan capaian 0 % atau dalam kategori sangat rendah.
5. Level Kapabilitas APIP, dari target kinerja pada level 3 dapat terealisasi pada posisi level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau dalam kategori sangat tinggi.
6. Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, dari target 75% dapat terealisasi 89% dengan capaian kinerja sebesar 119 % atau dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Inspektorat merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Inspektorat, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2021, Inspektorat berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pada Dinas PMD sekaligus sebagai alat kendali dan penilai kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2021 berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, baik pada dokumen rencana strategis maupun rencana kerja tahunan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Inspektorat

1. Susunan Organisasi Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat , Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

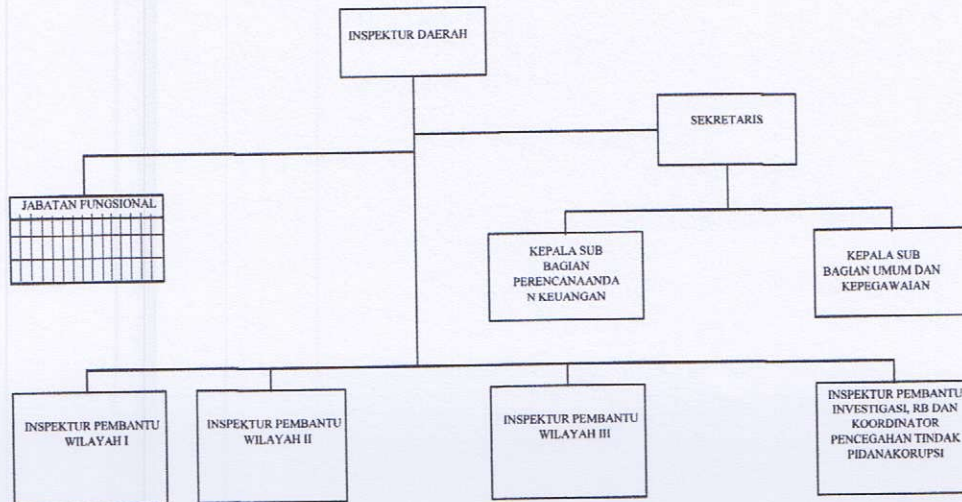
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	INSPEKTORAT
1	Inspektur
2	Sekretariat
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian b. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
3	Inspektur Pembantu Wilayah I
4	Inspektur Pembantu Wilayah II
5	Inspektur Pembantu Wilayah III
6	Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
7	Kelompok Jabatan Fungsional
	a. Auditor b. P2UPD

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



2. Data Pegawai Inspektorat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Balangan didukung oleh personil dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMA/ Setara	D2	D3/ Sarmud	S1	S2	S3	
Laki Laki	0	0	0	20	7	-	27
Perempuan	1	0	0	8	1	-	10
Jumlah	1	0	0	28	8	0	37
Prosentase	3,70	0	0	75,68	21,62	0	100

Dari tabel diatas tergambar bahwa prosentase personil dengan jenjang pendidikan formal S1 memiliki prosentase yang terbesar, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas personil Inspektorat Kabupaten Balangan dapat dikatakan cukup baik.

Dari segi kepangkatan susunan personil Inspektorat Kabupaten Balangan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Data PNS berdasarkan Kepangkatan

Jenis Kelamin	Golongan Pangkat											Jml
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Laki Laki	-	-	-	-	4	3	5	2	1	10	2	27
Perempuan	-	-	-	1	1	2	2	3	1	-	-	10
Jumlah	0	0	0	1	5	5	7	5	2	10	2	37
Prosentase	0	0	0	2,70	13,51	13,51	18,92	13,51	5,41	27,03	5,41	100

Gambaran tabulasi kepangkatan di atas terlihat golongan IVb memiliki prosentase terbesar yakni 27,03 %, hal ini merupakan potensi yang dapat dibina/dikaderkan untuk menduduki jabatan Struktural maupun fungsional pada struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan

Tabel 2.3
Data PNS berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	-	3
3	Eselon IV	-	2	2
4	Auditor Utama	-	-	-
5	Auditor Madya	-	-	-
6	Auditor Muda	7	4	11
7	Auditor Pertama	4	-	4
8	Auditor Pelaksana	-	-	-
9	Auditor Kepegawaian	-	-	-
10	PPUPD Ahli Utama	-	-	-
11	PPUPD Ahli Madya	9	1	10
12	PPUPD Ahli Muda	-	-	-
13	PPUPD Ahli Pertama	3	-	3
14	JFU lainnya/staf	-	3	3
Jumlah		27	10	37

Tabel 2.4
Data PNS berdasarkan latihan jabatan

No.	Latihan Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PIM II	1	-	1
2	PIM III	3	-	3
3	PIM IV	-	1	1
4	Penjenjangan Auditor Madya	-	-	-
5	Penjenjangan Auditor Muda	7	4	11
6	Pembentukan Auditor Ahli Pertama	1	-	1
7	Pembentukan Auditor Terampil	-	-	-
8	Pembentukan/Penjenjangan Auditor Kepegawaian	-	-	-
9	Pembentukan/Penjenjangan PPUPD	3	-	3
10	Prajabatan	-	2	2
Jumlah		15	8	23

Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Balangan per 31 Agustus 2021 berjumlah 37 orang, terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dari tabel 2.3 dan tabel 2.4 diatas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) jabatan struktural belum terisi dan masih ada 1 pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti pelatihan jabatan (PIM IV). Sedangkan untuk JF Auditor Keuangan telah berstatus auditor pertama dan auditor muda. Untuk JF auditor keuangan sudah mengikuti diklat sesuai jenjangnya baik diklat pembentukan auditor ahli maupun diklat penjenjangan auditor muda kecuali 2 orang masih berstatus CPNS dan 1 orang auditor pertama yang dilantik pada tahun 2021 melalui jalur inpassing. Untuk fungsional PPUPD dari total 13 orang, yang telah mengikuti diklat baik itu pembentukan maupun

penjenjangan baru 3 orang hal ini disebabkan 9 orang fungsional PPUPD baru dilantik pada tahun 2020 dan 2021 melalui jalur inpassing serta 1 orang masih berstatus CPNS. Hal ini merupakan potensi yang dapat dibina/dikaderkan untuk menduduki jabatan fungsional pada struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan besaran jumlah pegawai pada saat sekarang ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya objek pengawasan, untuk itu Inspektorat Kabupaten Balangan kedepannya masih memerlukan penambahan jumlah personel pegawai

3. Data Aset Inspektorat

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Inspektorat Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 7.549.999.598,00

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rincian Nilai Aset Inspektorat
per Tanggal 31 Desember 2021

NO	Jenis Aset	Nilai (Rp)
	Aset Tetap :	
1	Tanah	Rp.715.700.000,-
2	Peralatan dan mesin	Rp.3.649.449.259,-
3	Gedung dan bangunan	Rp.9.989.577.970,-
4	Jalan dan irigasi	Rp.483.968.990,-
5	Aset tetap lainnya	Rp.27.272.050,-
6	Akumulasi Penyusutan	(Rp.7.360.715.232,-)
	JUMLAH	Rp.7,505,253,037,-

C. Isu Isu Strategis

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi, maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau terdefinisi. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pelaksanaan QA atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2020 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Selain itu kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan menjadi isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Balangan. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan tolak ukur keberhasilan dari sebuah pengawasan yang dilaksanakan. Ketika auditan menyelesaikan rekomendasi dari atas pemeriksaan maka diharapkan ada upaya-upaya perbaikan system pengelolaan penyelenggaraan di setiap unit kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2021 merupakan transisi masa pemerintahan periode tahun 2016-2021 ke periode tahun 2021-2026 sehingga di dalam Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2021 memaparkan Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021-2026.

2.1 Perencanaan Kinerja Berdasarkan RENSTRA Periode Tahun 2016-2021

a. RENSTRA Inspektorat Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016 - 2021 adalah tahapan 5 (lima) tahunan dengan Visi *“Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”*. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan mengacu dan sejalan dengan Misi VI yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih, yaitu Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, dan Tujuan 1 Yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Transparan, Responsif dan Akuntabel.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Inspektorat Balangan menetapkan tujuan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 *“Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel”* dengan indikator yaitu Prosentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik.

Tabel 2.1

Tabel target indikator tujuan Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Prosentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik	-	75	80	85	90	90

Kaitan Renstra dengan RPJMD

Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berikut ini merupakan tabel keselarasan RPJMD dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 :

Tabel 2.2
Tabel Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA Inspektorat
Tahun 2016-2021

SASARAN PEMDA	IK SASARAN PEMDA	SASARAN OPD	IK SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6		7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas daerah	Level Maturitas SPIP & Kapabilitas APIP Kabupaten	Level 3	1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kematangan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level Maturitas SPIP & Kapabilitas APIP
						- kegiatan : Pendampingan dan Asistensi - sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Level Maturitas SPIP SKPD	Level Maturitas SPIP
							Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP

Berikut ini merupakan tabel gambaran Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, bisa dilihat target dari setiap indikator dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.3
Tabel RENSTRA Inspektorat Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.2 Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja BB	-	-	-	50%	50%
2	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	2.1 Prosentase Temuan Internal yang ditindaklanjuti	-	70 %	80%	95%	95%
		2.2 Prosentase Temuan Eksternal yang ditindaklanjuti	-	85 %	90%	95%	95%
3	Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal	3.1 Level Maturitas SPIP	2 (2,00)	2 (2,50)	3	3	3
		3.2 Level Kapabilitas APIP	2	3 (DC)	3	3	3
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	4.1 Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		4.2 Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	CC	B = 65	B = 70	BB = 71	BB = 71

b. RENJA Inspektorat

Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021. Tahun 2021 Inspektorat akan melaksanakan 9 (sembilan) Program dan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pada tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4	WAJIB							
4	Inspektorat							
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Balangan	12 Bulan	1.115.586.000			12 Bulan	1.227.144.600
	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	12 Bulan	Rp 5.150.000	APBD		12 Bulan	5.665.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 Bulan	Rp 159.600.000	APBD		12 Bulan	175.560.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	12 Bulan	Rp 76.111.614	APBD		12 Bulan	83.722.775
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Inspektorat	12 Bulan	Rp 48.310.000	APBD		12 Bulan	53.141.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	12 Bulan	Rp 78.293.471	APBD		12 Bulan	86.122.818
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	12 Bulan	Rp 56.807.900	APBD		12 Bulan	62.488.690
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	12 Bulan	Rp 8.843.725	APBD		12 Bulan	9.728.098
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	12 Bulan	Rp 9.840.000	APBD		12 Bulan	10.824.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	12 Bulan	Rp 54.574.290	APBD		12 Bulan	60.031.719
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	12 Bulan	Rp 618.055.000	APBD		12 Bulan	679.860.500

c. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, telah ditetapkan sasaran kinerja yaitu tujuan dan sasaran strategis organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan. Maka untuk mengukur keberhasilan capaian hasil (Outcome) dari masing-masing sasaran strategis tersebut, Inspektorat Kabupaten Balangan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja BB
2. Prosentase Rekomendasi Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti
3. Prosentase Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti
4. Prosentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP Minimal Level 3
5. Level Kapabilitas APIP
6. Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja
7. Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Penanggung Jawab	Sumber Data	Target					
				Alasan	Formulasi			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	% SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja BB	Porsentase	Inspektorat sebagai Evaluator atas SAKIP SKPD Kabupaten Balangan	Jumlah SKPD yang mendapat nilai SAKIP B dibagi Jumlah SKPD yang dievaluasi kali 100 %	Inpektur	Tim Evaliast SAKIP	-	-	-	50	50	50
2	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	% Rekomendasi Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	Porsentase	Penyelesaian atas Hasil Pengawasan dari Inspektorat	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah temuan Internal kali 100 %	Inpektur	Tim Monitoring	-	-	70	80	95	95
3	Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal	% Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	Porsentase	Penyelesaian atas Hasil Pengawasan dari Inspektorat Propinsi, BPK dan BPKP	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah temuan eksternal kali 100 %	Inpektur	Tim Monitoring	-	-	85	90	95	95
		Level Maturitas SPIP	Level	Untuk menentukan level Matriks SPIP maka sebagai alat ukurnya diperlukan adanya instrumen penilaian maturitas SPIP	Hasil Assesment dari BPKP	Inpektur	Tim SPIP	-	2 (2.00)	2 (2.50)	3,00	3,00	3,00
		Level Kapabilitas APIP	Level	Sebagai tolak ukur atas Kopabilitas APIP	Hasil Assesment dari BPKP	Inpektur	Tim APIP	-	level 2	level 3 DC	level 3	level 3	3
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Untuk meningkatkan Akuntabilitas keuangan desa tepat sasaran	Predikat Evaluasi SAKIP Inspektorat	Inpektur	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	-	CC	B (65)	B (70)	BB (71)	BB (71)
		% Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	Prosentase	Penyelesaian Hasil Pengawasan Inspektorat atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat	Jumlah Temuan BPK / Inspektorat yang di tidak lanjuti dibagi jumlah temuan BPK / Inspektorat kali 100 %	Inpektur	Tim Monitoring	-	100	100	100	100	100

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase SKPD yang 1.1 mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja BB	50 %
2	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	2.1 % Rekomendasi pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	95 %
		2.2 % Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	95 %
3	Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal	3.1 Prosentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3	29 %
		3.2 Level Kapabilitas APIP	3
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	4.1 Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%
		4.2 Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	BB = 71

2.2 Perencanaan Kinerja Inspektorat Berdasarkan RENSTRA Periode 2021-2026

a. RENSTRA Inspektorat 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. RPJMD memuat Visi dan misi pembangunan. Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dicanangkan merupakan visi misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021-2026, yaitu:

“Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan

Dari lima misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang terkait dengan fungsi pengawasan adalah pada misi ke IV yaitu *“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara”*. Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan

dan ingin dicapai Inspektorat selaras dengan tujuan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN”

Tabel 2.7
Target dan indikator tujuan Inspektorat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Indeks Integritas	78	78	79	80	81	82

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Balangan terdapat dua sasaran yaitu

:

1. Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif
2. Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				Pada Tahun Ke-					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Mewujudkan pengawasan yang berkwalitas dan efektif	Indeks Integritas	78	79	80	81	82	
			Level maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	WBK 1 WBBM 1	26 %	39%	52%	65%	
		Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	75%	78%	80%	82%	85%	

Kaitan Renstra Inspektorat 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat, pada tabel 2.9 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini :

TABEL 2.9
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Penanggung Jawab	Sumber Data
			tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026				
1	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil QA dari BPKP	Inspektur	Tim SPIP
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil QA dari BPKP	Inspektur	Sub bag Umpeg
3	Indeks Integritas	77,28	78	78	79	80	81	82	82	Hasil Survei Penilaian Integritas dari KPK	Inspektur	Irbanwil
4	Prosentase Unit Pelayanan Publik yang Mendapat Predikat WBK	0	13	13	26	39	52	65	65	Hasil Penilaian Zona Integritas dari Kemenpan RB	Inspektur	Irbanwil
5	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	89	75	75	78	80	82	85	85	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kali 100	Inspektur	Subbagian Perencanaan

b. RENJA Inspektorat

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2021 disusun berdasarkan dengan RENSTRA Inspektorat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan nilai pagu program kegiatan yang diakomodir dalam RENJA Perubahan Tahun 2021. Adapun faktor perubahan renja adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian program kegiatan mengacu dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026
2. Adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan.

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja tahun 2021 dapat diuraikan dalam tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Rencana Tahun 2021															
Kode	Uraian/Detail Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		SKPD Penanggung Jawab	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(12-11)	(14)	(15)	(16)
6	UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
6.01	INSPEKTORIAT														
6.01.01	1 Program Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan (%), tercapainya disiplin Aparatur, terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SKAP) Inspektoriat	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	100	88 (71)	7.541.891.000	7.235.931.000	(305.960.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
								100							
6.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Presentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	4 dokumen	100	123.725.000	55.275.000	(68.450.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun setiap waktu	Presentasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	3 dokumen	100	15.975.000	14.250.000	(1.725.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.01.06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja (LKRP)	Presentasi laporan dokumen laporan capaian kinerja dan kinerja Realisasi Kinerja SKPD yang baik	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	1 dokumen	100	33.655.000	18.525.000	(15.130.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.01.07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang divalasi mencapai nilai 85	Presentasi Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	50%	100	74.095.000	22.540.000	(51.555.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Catatan pelaksanaan keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	12 bulan	100	4.979.321.000	4.180.380.000	(798.941.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.02.01	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Presentasi ASN yang tercapai gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	12 bulan	100	4.987.468.000	4.173.955.000	(813.513.000)	APBD	APBD	Inspektoriat
6.01.01.2.02.07	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Presentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	Inspektoriat	Inspektoriat	Kabupaten Belunggan	Kabupaten Belunggan	1 dokumen	100	11.915.000	8.425.000	(3.490.000)	APBD	APBD	Inspektoriat

6.01.01.2.05	3	Administrasi Kepogawisan Peringkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Kepogawisan Peringkat Daerah	Proses pelaksanaan administrasi kepegawisan peringkat daerah	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	100	945.630.000	815.700.000	(89.870.000)	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.05.02	6	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pengadaan pakan dinas beserta alat kelengkapannya	Inspektoral	Kabupaten Balingan	70 sdt	70 sdt	52.500.000	52.500.000	-	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.05.09	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemerkas dan apurakar pengawasan - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akutabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektoral	Kabupaten Balingan	16 pegawai 30 pegawai	35 pegawai	521.670.000	432.000.000	(89.870.000)	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.05.11	8	Berbagian Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Berbagian Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti berbagai jenis implementasi peraturan perundang-undangan	Inspektoral	Kabupaten Balingan	20 pegawai	20 pegawai	331.260.000	331.260.000	-	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06	4	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah waktu Administrasi Umum Peringkat Daerah	proses pelaksanaan administrasi peringkat daerah	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	100	724.421.225	974.078.325	249.654.700	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06.01	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah waktu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	12 bulan	8.843.725	8.843.725	-	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06.02	10	Pengadaan Perbaikan dan Perlebaran Jalan	Jumlah Perbaikan dan Perlebaran Jalan yang disediakan	Persentase keberhasilan Perbaikan dan Perlebaran Jalan sesuai kebutuhan	Inspektoral	Kabupaten Balingan	13 buah	100	136.550.000	214.050.000	77.500.000	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06.05	11	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah alat Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan pengadaan	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	12 bulan	56.897.600	56.897.600	(300)	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06.06	12	Pengadaan Bahan Baku dan Perbaikan Perundang-undangan	Jumlah waktu Bahan Baku dan Perbaikan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Baku dan Perbaikan Perundang-undangan	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	12 bulan	9.840.000	9.840.000	-	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.06.09	13	Pengembangan Regat Koordinasi dan Konsultasi SSKD	- Jumlah Waktu Mekanisme dan Mekanisme yang disediakan - Jumlah Waktu Regat Regat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase kinerjanya Regat Koordinasi dan Konsultasi SSKD	Inspektoral	Kabupaten Balingan	12 bulan	100	612.300.000	684.526.000	172.155.000	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.07	5	Pengadaan Barang M&M Daerah Peringkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Barang M&M Daerah Peringkat Kecamatan	Persentase Pengadaan Barang M&M Daerah sesuai RKEU	Inspektoral	Kabupaten Balingan	1 paket	100	57.000.000	750.854.800	833.854.800	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.07.05	14	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Jumlah unit pengadaan mebel	Inspektoral	Kabupaten Balingan	1 paket	0	57.000.000	-	(57.000.000)	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.07.09	15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Inspektoral	Kabupaten Balingan	0	4 paket	-	750.854.800	750.854.800	APBD	Inspektoral

6.01.01.2.08	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	384.555,375	340.320,875	-	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.08.01	16	Penyediaan Jasa Survei Menyerat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Survei Menyerat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyerat	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	5.150,000	5.150,000	-	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.08.02	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan kebutuhan tenaga jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	139.800,000	118.400,000	(23.280,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.08.04	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja, Jumlah waktu Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja, Jumlah waktu Alat Tulis Kantor yang disediakan	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	238.885,375	218.770,875	(21.034,500)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.09	7	Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pembelajaran barang milik Daerah	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	387.238,000	418.268,000	52.030,000	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.09.02	19	Penyediaan Jasa Pembelajaran, Biaya Pembelajaran, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat Pembelajaran Rutin/Berkala	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	277.350,000	285.500,000	8.150,000	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.01.2.09.10	20	Pembelajaran/Rehabilitasi Sernin dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Gedung Kantor yang mendapat Pembelajaran Rutin/Berkala	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	12 bulan	89.888,000	137.688,000	43.800,000	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	100%	1.879.958,000	1.353.845,000	(526.115,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01	8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LUP Kewira Pengawasan Internal	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	73 LUP	1.105.178,000	616.863,000	(488.315,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01.01	21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LUP Kewira Pemerintah Daerah	Tertibkannya LUP	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	46 LUP	250.000,000	50.760,000	(199.240,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01.03	22	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah LUP revisi Laporan Kinerja	Rakor Pemeliharaan data regional kabupaten/kabupaten/propinsi/daerah nasional	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	2 LUP	104.095,000	60.500,000	(43.595,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01.04	23	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah LUP revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	10 LUP	184.585,000	135.750,000	(48.835,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01.05	24	Pengawasan Desa	Jumlah LUP desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang disampaikan tepat waktu	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	15 LUP	250.000,000	92.250,000	(157.750,000)	APBD	APBD	Inspektoral
6.01.02.2.01.07	26	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemberian BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APP yang selesai ditindaklanjuti	Inspektoral	Inspektoral	Kabupaten Balangan	95 % - 95 % 1 lap	316.488,000	277.803,000	(38.685,000)	APBD	APBD	Inspektoral

6.01.02.2.02	9	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Kelemahan Material Eksternal	Inspektorat	Kabupaten Balingan	50	Rp	574,780,000	Rp	736,980,000	162,200,000	APBD	APBD	Inspektorat
				Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/audit yang dilaksanakan	Inspektorat	Kabupaten Balingan	95 LHP								
6.01.02.2.02.01	27	Peningkatan Nyevelasian Kerugian Negara/Daerah	Tertentuannya IPIG	Persentase penyelesaian kerugian daerah	Inspektorat	Kabupaten Balingan	75	Rp	100,000,000		96,640,000	(9,360,000)	APBD	APBD	Inspektorat
6.01.02.2.02.02	28	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan tepat waktu	Inspektorat	Kabupaten Balingan	95 LHP	Rp	474,780,000		646,340,000	171,560,000	APBD	APBD	Inspektorat
6.01.03	3	Program Pemantauan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level kapabilitas APSP & Maturitas SPP	Persentase Unit Pelayanan Publik yang Mendapat Predikat WBK	Inspektorat	Kabupaten Balingan	13	Rp	745,557,000	Rp	751,575,000	6,018,000	APBD	APBD	Inspektorat
				Level Maturitas SPP											
				Indeks Integritas			Level 3	3							
				Level kapabilitas APSP				78							
6.01.03.2.02	10	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan kegiatan pendampingan dan asistensi	Persentase dengan nilai Maturitas SPP Level 3	Inspektorat	Kabupaten Balingan	30%	Rp	745,557,000	Rp	751,575,000	6,018,000	APBD	APBD	Inspektorat
				Nilai PMFIRB				70							
				Persentase Pencapaian Indikator MCP			4 laporan	75%							
				Persentase SKPD / Unit Kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat sesuai WBK				13%							
6.01.03.2.02.01	29	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Maturitas SPP Level 3	Jumlah SKPD yang disetujui dalam penilaian Maturitas SPP Level 3	Inspektorat	Kabupaten Balingan	9 SAPD		219,094,000		146,830,000	(72,264,000)	APBD	APBD	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	30	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD / Dana yang melaksanakan TLHP	Jumlah SKPD yang disetujui PMFIRB	Inspektorat	Kabupaten Balingan	85		150,000,000		104,720,000	(45,280,000)	APBD	APBD	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	31	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pengaduan yang tertangani	Persentase Pemenuhan Data Dukung Indikator MCP	Inspektorat	Kabupaten Balingan	100	90	277,405,000		415,405,000	138,000,000	APBD	APBD	Inspektorat
6.01.03.2.02.04	32	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Nilai integritas	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang lulus sesuai akreditasi WBK	Inspektorat	Kabupaten Balingan	78	3 unit kerja	99,058,000	Rp	84,820,000	(14,238,000)	APBD	APBD	Inspektorat
JUMLAH AKUMULASI PERUBAHAN															
									9,967,486,000		9,641,353,000	(326,083,000)			

c. IKU Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Balangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan dan bersifat menunjang atau tidak mendukung secara langsung pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan. Adapun Indikator Kinerja Strategis Inspektorat selama 5 tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Integritas
- b. Level maturitas SPIP
- c. Level kapabilitas APIP
- d. Prosentase Unit Pelayanan Publik yang Mendapat Predikat WBK
- e. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Penanggung Jawab	Sumber Data
				Alasan	Formulasi		
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Level maturitas SPIP	Level	Untuk menentukan level maturitas SPIP maka sebagai alat ukurnya diperlukan adanya instrument penilaian maturitas SPIP	Hasil QA (Quality Assurance) dari BPKP	Inspektur	Tim SPIP
		Level kapabilitas APIP	Level	Sebagai tolak ukur atas kualitas/kapabilitas APIP	Hasil QA (Quality Assurance) dari BPKP	Inspektur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Indeks Integritas	Nilai	Perilaku Anti Korupsi masyarakat Indonesia semakin meningkat dan dapat diukur dengan survey penilaian integritas,	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh KPK RI	Inspektur	Sub. Bagian Perencanaan dan keuangan

				semakin tinggi nilai indeks menurunkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati rendah menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi					
			Prosentase Pelayanan yang Mendapat Predikat WBK	Unit Publik Mendapat Predikat WBK	Prosentase	Semakin banyaknya Unit Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menunjukkan kualitas pelayanan yang bersih dan bebas korupsi	Hasil Penilaian dari kemenangan	Inspektur	Irbanwil
2	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan		Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Prosentase	Semakin tingginya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menunjukkan bahwa kualitas pengawasan semakin baik dan kepatuhan auditee terhadap hasil pengawasan meningkat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dibagi jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti kali 100 %	Inspektur	Sekretaris	

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Predikat	Capaian kinerja instansi daerah dapat diukur dari nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Balangan	Inspektur	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat					
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Prosentase	Keterlibatan administrasi pencatatan Aset	Laporan Pencatatan Aset	Inspektur	Sub. Bagian Perencanaan dan keuangan

d. Perjanjian Kinerja Inspektorat

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan komitmen seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Balangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja ini adalah ringkasan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021. Adapun uraian lebih lanjut dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021

KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Level maturitas SPIP	Level 3 (3,023)
	Level kapabilitas APIP	Level 3
	Indeks Integritas	78
	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	WBBM :1 WBK :1
Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	75 %

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif dapat diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Level maturitas SPIP

- b. Level kapabilitas APIP
- c. Indeks Integritas
- d. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Untuk pencapaian sasaran “Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif” Inspektorat Kabupaten Balangan menetapkan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan didukung anggaran sebesar Rp. 751.575.000,-

2. Tercapainya sasaran Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan” Inspektorat Kabupaten Balangan menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.353.843.000,-

Selanjutnya dapat dirincikan perjanjian kinerja para pejabat structural administrator/ Eselon III untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektur pada Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	71 (BB)
2	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%
3	Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Inspektorat Daerah	100%
4	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
		Persentase SDM Inspektorat Daerah yang bersertifikat sesuai keahlian	100%
5	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Persentase Pemenuhan elemen penilaian mandiri kapabilitas APIP	100%
6	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan	75 %

Tabel 2.19
Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III
Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	60 %
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	50%
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan	75%
		Persentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100%

Tabel 2.20
Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi
Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	100%

Laporan Kinerja Tahun 2021

	Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	WBBM :2 WBK :1
	Nilai PMPRB	70
	Persentase Pencapaian Indikator MCP	75%
	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	45%

Tabel 2.16

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100 %
		Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%
2	Tersedianya data kepegawaian	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS	100 %
3	Meningkatnya kapasitas SDM	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
4	Terlaksananya pengelolaan BMD secara tertib	Jumlah Laporan Pencatatan Aset	1 Dokumen
5	Tersedianya Laporan Aset	Persentase Penyampaian Laporan Aset tepat waktu.	100%

Tabel 2.17

Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Laporan Kinerja yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100 %
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100 %
3	Tersedianya Laporan Keuangan	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %
4	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja	Persentasi Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100 %
5	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	75 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja Berbasis Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021

A. Pengukuran Kinerja

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 telah habis masa berlakunya sampai Agustus 2021 dan telah berganti dengan RENSTRA 2021-2026 yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Balangan memiliki kewajiban melaporkan hasil pengukuran kinerja atas :

3. Capaian kinerja akhir RENSTRA 2016-2021

4. Capaian Kinerja tahun pertama RENSTRA 2021-2026

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan akhir RENSTRA Tahun 2016-2021 diukur dari (1) Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Akhir RENSTRA 2016-2021 dan (2) Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai tahun terakhir masa RENSTRA 2016-2021.

Perjanjian kinerja dan targetnya merupakan dokumen utama yang menjadi perhatian agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Balangan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategorisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Capaian Rata – rata
atas Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
I	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi
III	66 % ≤ 75 %	Sedang
IV	51 % ≤ 65 %	Rendah
V	≤ 50 %	Sangat Rendah

mendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tujuan Inspektorat Kabupaten Balangan yang tertera pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu “ Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel” memiliki indikator tujuan Porsentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja akhir RENSTRA 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tujuan dan Indikator Tujuan Akhir RENSTRA 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Akhir RENSTRA	Capaian Akhir RENSTRA	Kategori
1	Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Porsentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik	%	90	87	96	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian akhir kinerja tujuan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel dengan Indikator tujuan Porsentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat dari jumlah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan terdapat 18 SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB dan 18 SKPD mendapatkan nilai SAKIP B.

Capaian Tujuan dan Indikator Tujuan Periode RENSTRA 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2021
1	Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik	Persen	-	80	85	90	95	-	5	60	75	87	-	96

B. Capaian Kinerja Organisasi

B1. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Akhir RENSTRA 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten di dasarkan pada Surat Keputusan Inspektur Balangan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Balangan. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	2020	2021			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMD Kab/Kota	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMDN
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Level Maturitas SPIP	100 %	Level 3	Level 3 (3,023)	100 %	Level 3	100 %	100 %	-	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator prosentase tingkat maturitas SPIP Pemda Tahun 2021 sebagaimana table diatas adalah sebesar 100% yaitu dari target kinerja level 3 dapat terealisasi pada posisi level 3 dengan nilai 3,023 atau Terdefinisi . Capaian Kinerja untuk indikator Level Maturitas SPIP Pemda masuk dalam kategori “ **Sangat Tinggi**”. Level Maturitas tersebut merupakan hasil QA (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan oleh BPKP Pusat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 oktober 2018. Pelaksanaan QA (Quality Assurance) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah oleh BPKP minimal 3 tahun sekali. Dalam rangka penguatan Implementasi SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Hasil penjaminan mutu hasil QA pada tahun 2021 Inspektorat Balangan telah melaksanakan Asistensi Penyusunan Profil Risiko seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bisa dikategorikan cukup membanggakan karena pada saat

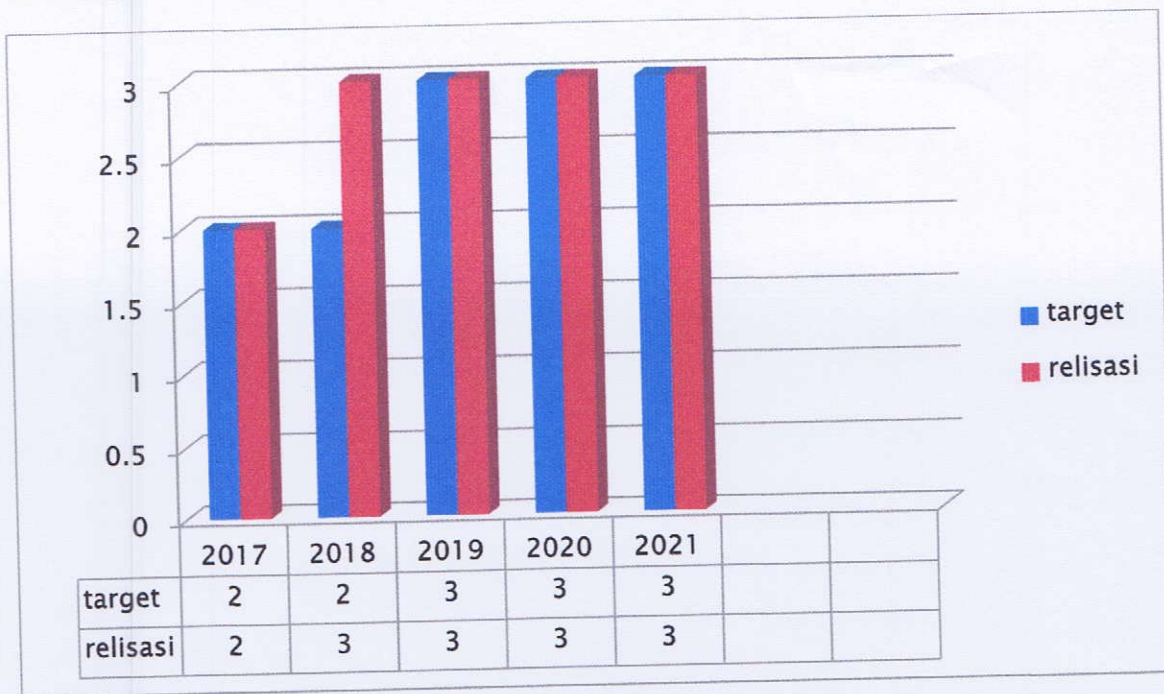
pelaksanaan Quality Assurance atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkup kerja Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1612/D3/02/2018 tanggal 1 Oktober 2018 bahwa terdapat 5 Pemerintah Daerah yang telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yaitu Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah kabupaten Tabalong dan Pemerintah Hulu Sungai Utara.

Pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Atas hasil penjaminan mutu hasil QA yang belum mencapai 100 % dan perbedaan skor maturitas SPIP antara tim assessor dan tim QA , maka upaya yang harus dilakukan oleh Kabupaten Balangan sesuai dengan saran dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD sehingga dapat menjadi acuan untuk memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut
- 3) Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, online, realtime sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (dashboard pimpinan) secara update dan efektif untuk pengambilan keputusan.
- 4) Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi area of improvement (AOI)
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 6) Membuat database dokumen atas hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilaksanakan agar dapat dijadikan referensi bagi pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dimasa yang akan datang
- 7) Memperbaiki materi dan skor maturitas dalam laporan hasil Assesment sesuai hasil QA

Grafik capaian kinerja level Maturitas SPIP



Manfaat atau dampak Maturitas SPIP level 3 bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. SPIP level 3 mendukung penyajian laporan keuangan yang handal
2. SPIP level 3 mendukung pencapaian tujuan program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD RKPD dan DPA secara efektif
3. Meningkatkan pengamanan aset daerah
4. Modal utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan implementasi manajemen risiko pada seluruh SKPD
6. SPIP menjadi salah satu point penilaian opini WTP dimana pada lembar opini tersebut ada frasa kalimat bahwa SPI telah memadai.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- 1) Pemerintah Kabupaten Balangan sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik
- 2) Pemerintah Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur kode etik/aturan perilaku pegawai negeri sipil
- 3) Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, dan memberlakukan kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi
- 4) Kabupaten Balangan sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/ mengimplementasikan dan melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala efektivitas struktur organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan / Hambatan dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Balangan :

1. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
2. Pimpinan SKPD belum melakukan pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi
3. Kabupaten Balangan belum memiliki sistem yang dapat melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala atas persepsi pegawai terkait kepemimpinan yang kondusif
4. Kabupaten Balangan belum memiliki sistem secara otomatis melakukan pemantauan efektifitas struktur organisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan

Solusi Strategi Pemecahan Masalah

1. Seluruh pimpinan SKPD agar melaksanakan evaluasi atas kepatuhan seluruh pegawai terhadap kehadiran, jam kerja, dan aturan perilaku/kode etik secara terdokumentasi
2. Seluruh pimpinan SKPD agar melakukan evaluasi berkala yang terdokumentasi atas penyelenggaraan SPIP capaian kinerja program/kegiatan, capaian indikator kinerja sasaran dalam dokumen penetapan kinerja termasuk IKU
3. Seluruh pimpinan SKPD agar melakukan evaluasi atas daftar risiko, penilaian risiko, dan rencana tindak pengendaliannya secara terdokumentasi.

B2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Akhir RENSTRA 2016-2021

Capaian Kinerja Inspektur berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Inspektur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Kinerja 2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian Terhadap Akhir RENSTRA	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
				Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB	20%	50%	45 %	90 %	50%	90%	-	-	-
2	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	% Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	94%	95%	90 %	94 %	95%	94%	-	-	-

	% Rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	93%	95 %	87%	91%	95%	91%	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal	% SKPD dengan hasil QA	0	0	0	22%	0	-	-	-
		Maturitas SPIP minimal level 3								
		Level Kapabilitas APIP	100 %	3	100 %	100%	100%	-	-	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Keuangan Kinerja	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	100 %	100%	100%	100%	-	-	-
		Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	97%	BB (71)	BB (73,03)	BB(71)	102 %	-	-	-

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Realisasi					Capaian							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Level Maturitas SPIP	Level	-	2 (2.00)	2 (2.50)	3,00	3,00	3,00		Level 2	3 (3,02)	3 (3,02)	3 (3,02)	3 (3,02)	-	100	120	100	100	100
2	Level Kapabilitas APIP	Level	-	level 2	level 3 DC	level 3	level 3	3		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	100	100	100	100	100

B.2.1 Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B.2.1.1. Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB

Indikator Kinerja Sasaran Prosentase SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB pada tahun 2021 memiliki capaian 90% dari target 50% realisasi 45 % atau dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini berdasarkan penilaian evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020 dari 41 SKPD terdapat 18 SKPD yang mendapatkan nilai Evaluasi SAKIP BB, 18 SKPD mendapat nilai SAKIP B dan 5 SKPD mendapatkan nilai SAKIP CC.

Namun secara keseluruhan hasil Evaluasi SAKIP SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SAKIP SKPD pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan hasil Evaluasi SAKIP SKPD pada tahun 2020 dari 41 SKPD yang dievaluasi terdapat 2 SKPD yang mendapat predikat BB, 29 SKPD mendapat predikat B dan 10 SKPD mendapat predikat CC.

Permasalahan/Hambatan dalam pencapaian pencapaian target evaluasi nilai SAKIP SKPD adalah sebagai berikut :

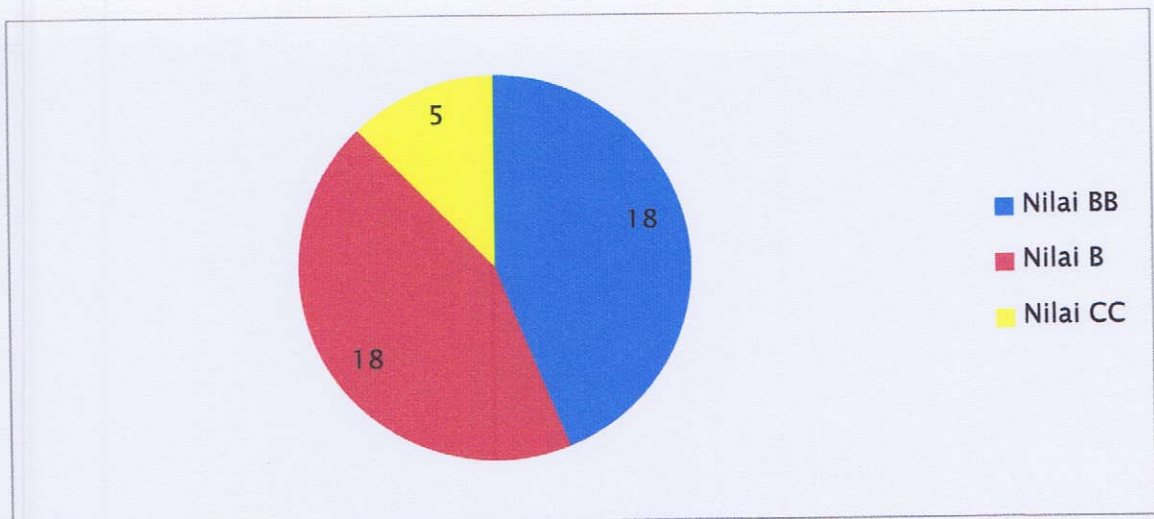
1. SKPD tidak menindaklanjuti rekomendasi evaluasi LKIP tahun sebelumnya dalam rangka upaya perbaikan Nilai SAKIP
2. Perencanaan kinerja tujuan Renstra belum dilengkapi indikator tujuan
3. Pengumpulan data kinerja hanya dilaksanakan saat penyusunan pelaporan kinerja sehingga analisis data kinerja belum sepenuhnya memadai
4. evaluasi internal belum dilaksanakan secara konsisten (berkala/semesteran)

Solusi/Strategi Pemecahan masalah sebagai upaya peningkatan hasil evaluasi LAKIP SKPD adalah sebagai berikut :

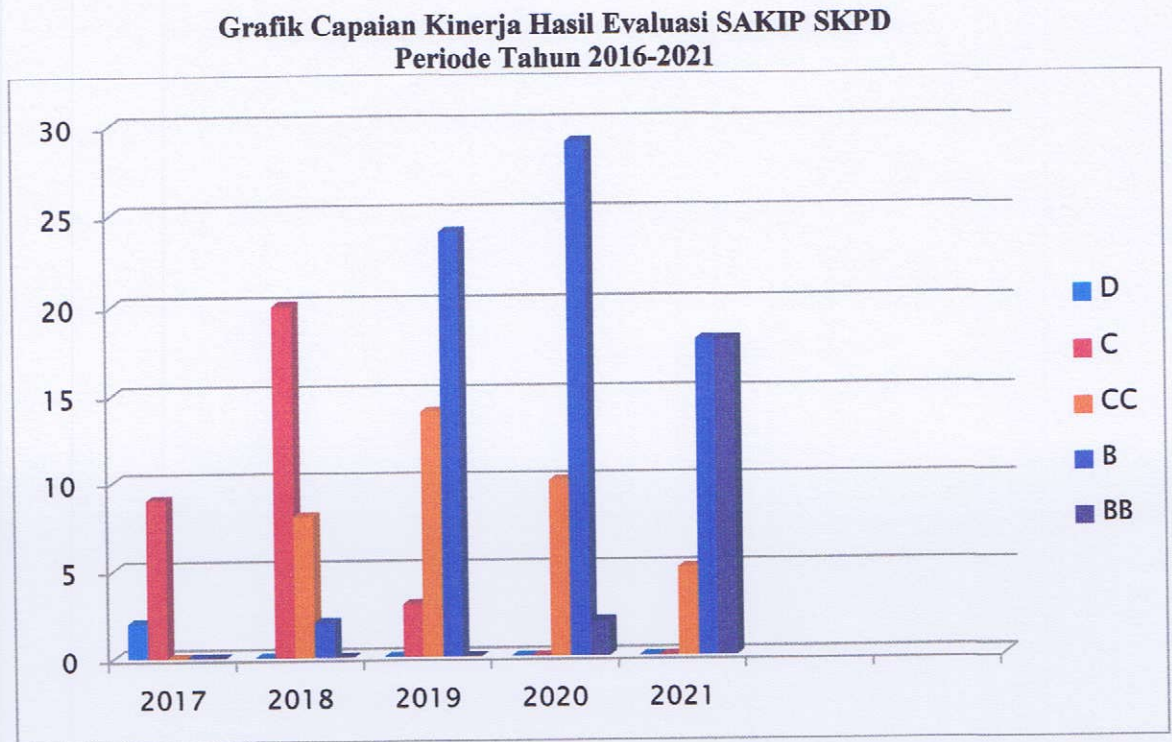
1. Menginstruksikan agar semua SKPD mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan oleh Inspektorat
2. Menginstruksikan kepada SKPD untuk melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan melaporkan kepada pimpinan permasalahan kendala atas pencapaian kinerja yg blm tercapai/dilaksanakan

3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD sekaligus dalam rangka pendampingan penyusunan SAKIP
4. Koordinasi yang intensif dengan pihak yang terkait yaitu Bappeda dan Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan
5. Meningkatkan kapabilitas evaluator dengan mengirim Tim Evaluasi melaksanakan bimbingan teknis

**Grafik Capaian Kinerja Prosentase SKPD
Yang Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal BB
(Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021)**



Apabila dilihat dari tingkat capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik sebagaimana berikut ini :



B.2.2 Sasaran Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan

B.2.2.1 Prosentase Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti

Indikator Prosentase Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 94% dari target 95% realisasi 90% atau dalam kategori **Tinggi**. Dari hasil pantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada tahun 2021 terdapat temuan 8 rekomendasi 87 sedangkan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti 80.

B.2.2.2 Prosentase Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti

Indikator Prosentase Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 91 % dari target 95% realisasi 87% atau dalam kategori **Tinggi**. Berdasarkan hasil rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan semester II yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan sampai

dengan tahun 2021 terdapat jumlah temuan sebanyak 342, jumlah rekomendasi sebanyak 756 dengan status pemantauan tindak lanjut dengan kategori sesuai atau selesai sebanyak 656, belum sesuai sebanyak 88 rekomendasi, belum ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi.

Pencapaian kinerja atas indikator Prosentase Temuan Eksternal yang ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan cukup membanggakan karena berdasarkan hasil rekonsiliasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kabupaten Balangan menduduki peringkat ke 3 penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dimana peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian 92%, Peringkat ke 2 diduduki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian 88% dan Peringkat ketiga Kabupaten Balangan dengan capaian 87%.

B.2.3. Sasaran Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal

B.2.3.1. Persentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3

Indikator Persentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3 pada tahun 2021 capaian kinerja 0 dari target 22% atau dalam kategori **Sangat Rendah**. Hal ini karena belum ada pedoman penilaian SPIP dilevel SKPD. Dalam rangka penguatan SPIP dilevel SKPD, Inspektorat telah melaksanakan asistensi penyusunan profil risiko pada seluruh SKPD dan kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Penyusunan profil risiko bertujuan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja yang bisa mengganggu pencapaian tujuan serta kinerja unit kerja tersebut. Penyusunan profil risiko ini merupakan salah satu upaya manajemen pengendalian serta implementasi SPIP yang terdiri dari 5 unsur SPIP diantaranya:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian Risiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan

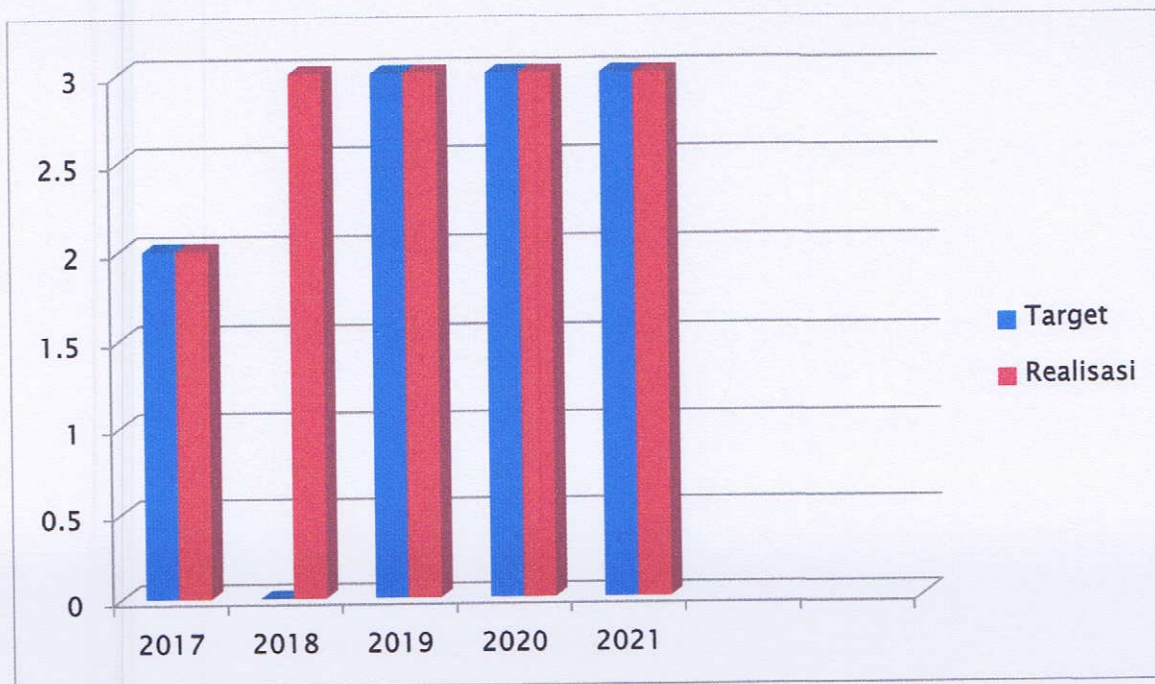
B.2.3.2. Level Kapabilitas APIP

Pencapaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP pada tahun 2021 sebesar 100 % dari target level 3 realisasi pada posisi level 3 atau dalam kategori. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance / QA) Nomor LBINAPIP-166/PW16/6/2019 tanggal 21 Mei 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Balangan telah berada di **Level 3** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sehingga dapat disimpulkan Capaian indikator Level Kapabilitas APIP masuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”. Keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan atas indikator Level Kapabilitas APIP ini jika dibandingkan dengan instansi sejenis merupakan capaian yang membanggakan karena dari 11 kabupaten dan 2 kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan baru 3 Kabupaten Kota dan 1 Propinsi yang mendapatkan level 3 yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Propinsi Kalimantan Selatan.

Namun demikian sebagai upaya untuk perbaikan kedepannya yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai sarana untuk penguatan (Continuous Improvement) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna, maka perlu upaya – upaya perbaikan sesuai dengan saran dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai berikut :

1. Satgas PK APIP untuk selalu melaksanakan dan melakukan Update data penilaian mandiri Kapabilitas APIP secara berkala triwulan dalam aplikasi panel Kapabilitas APIP pada laman BPKP bpkp.go.id
2. Melaksanakan kegiatan audit kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan pedoman audit kinerja yang telah disusun
3. Menindaklanjuti laporan hasil dari Tim Pengawas Kegiatan APIP
4. Melakukan penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP level 3 (SA) dan melaporkan kepada Bupati Balangan dengan tembusan kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan untuk dilakukan penjaminan kualitas (QA)

Grafik perbandingan capaian kinerja Level Kapabilitas APIP



B.2.4 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

B.2.4.1. Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti

Capaian indikator Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti pada tahun 2021 sebesar 100% dari target 100% realisasi sebesar 100% atau dalam kategori **Sangat Tinggi**. Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan nomor 4/LHP/XIX.BJM/05/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Balangan TA 2020 tidak terdapat temuan terkait Inspektorat.

B.2.4.2 Indikator Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Capaian indikator Indikator Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat pada tahun 2021 sebesar 102% dari target Nilai SAKIP Inspektorat BB (71) realisasi nilai SAKIP BB (73,03) atau dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Jika dilihat capaian pada tahun sebelumnya nilai Sakip Inspektorat pada tahun 2020 pada nilai B (69,11) mengalami kenaikan. Pencapaian kinerja atas indakator Nilai / Predikat Akuntabilitas

Kinerja Inspektorat jika dibandingkan dengan instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan bisa dikategorikan cukup membanggakan karena dari 41 SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan hanya 18 SKPD yang mendapat nilai LKIP BB dan Inspektorat termasuk SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB.

Dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Inspektorat sesuai dengan saran perbaikan oleh Tim Evaluator maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring terhadap capaian target jangka menengah yang ada dalam Renstra
2. Memanfaatkan perencanaan kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran
3. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment
4. Memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk penilaian kinerja (reward & punishment)
5. Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata yaitu melakukan monev setiap triwulan
6. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mampu meningkatkan kualitas pencapaian kinerja organisasi

Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon III berdasarkan RENSTRA 2016-

2021

Capaian Kinerja sasaran program yaitu eselon III sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS INSPEKTORAT

Tabel capaian kinerja sasaran program untuk Eselon III (Sekretaris)
Inspektorat Kabupaten Balangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	jumlah pengaduan yang tertangani	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat Kabupaten	Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti	95%	90%	94%
3	Meningkatnya SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat Provinsi, BPKP & BPK	Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	87%	91%
4	Meningkatnya Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Perencanaan kinerja	20	20,95	100%
		Nilai Pelaporan Kinerja	BB = 71	BB (73,03)	102 %

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas berikut ini penjabaran analisis capaian kinerja :

1. Indikator Kinerja jumlah pengaduan yang tertangani

Dapat dilihat capaian indikator jumlah pengaduan yang tertangani sebesar 100 %. Pada tahun 2021 terdapat pengaduan masyarakat sebanyak 4 kasus dan sudah dilaksanakan audit terhadap pengaduan tersebut. Berikut ini laporan pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan pada tahun 2021.

Tabel 3.6
Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2021

NO	D E S A	KECAMATAN	STATUS TINDAK LANJUT	KETERANGAN	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT
1	Bihara	Awayan	Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus	LHP NOMOR 705/01/LH-AI/INSPEKTORAT -BLG/2021 Tanggal 4 April 2021	-
2	Kambyain	Tebing Tinggi	Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus	LHP NOMOR 705/05/LH-AI/INSPEKTORAT -BLG/2021 Tanggal 16 Juli 2021	Saat sedang memasuki dalam proses Persidanga di pengadilan TIPIKOR Banjarmasin
3	Uren	Halong	Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus	LHP NOMOR 705/07/LH-AI/INSPEKTORAT -BLG/2021 TGL 29-10-2021	-
4	Kusambi Hilir	Lampihong	Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus	LHP NOMOR 705/08/LH-AI/INSPEKTORAT -BLG/2021 TGL 29-10-2021	Pengembalian Kerugian Keuangan Desa ke Kas Desa

2. Indikator Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Prosentase Temuan Internal yang ditindaklanjuti tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, yaitu dari target 95 % realisasi 90 % capaian sebesar 94 % atau dalam kategori “ **Sangat tinggi**” . Dari hasil pantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada tahun 2021 terdapat temuan 8 rekomendasi 87 sedangkan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti 80.

3. Indikator Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti

Capaian indikator Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 91% dari target 95% realisasi 87%. . Berdasarkan hasil rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan semester II yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 terdapat jumlah temuan sebanyak 342, jumlah rekomendasi sebanyak 756 dengan status pemantauan tindak lanjut dengan kategori sesuai atau selesai sebanyak 656, belum sesuai sebanyak 88 rekomendasi, belum ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi.

Tabel 3.7
Data Laporan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan

No	Sumber Pemeriksaan		Jumlah Temuan Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Prosentase Tindak Lanjut	Keterangan
1	Internal	Inspektorat Kabupaten Balangan	87	80	92%	Pemeriksaan Tahun 2021
2	Eksternal	BPK RI	756	656	87%	Pemeriksaan Tahun 2005 sd Tahun 2021 berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak lanjut Semester II dengan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan
		BPKP	0	0	0	
		Inspektorat Propinsi	0	0	0	
		Jumlah	843	736	89%	

4. Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

Pencapaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP pada tahun 2021 sebesar 100 % dari target level 3 realisasi pada posisi level 3 atau dalam kategori. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance / QA) Nomor LBINAPIP-166/PW16/6/2019 tanggal 21 Mei 2019 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Balangan telah berada di **Level 3** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sehingga dapat disimpulkan Capaian indikator Level Kapabilitas APIP masuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”.

5. Indikator Nilai Perencanaan kinerja

Capaian Indikator nilai perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja indikator nilai perencanaan kinerja mengalami penurunan yaitu nilai perencanaan pada tahun 2020 23,92 sedangkan untuk capaian tahun 2020 indikator nilai perencanaan kinerja sebesar 120 % dari target 20 realisasi 23,92. Namun demikian kami masih perlu meningkatkan nilai perencanaan kinerja sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi APIP tahun 2019 yaitu :

1. Memuat target tujuan / keberhasilan pada Rencana Strategis
2. Melaksanakan monitoring secara berkala atas pencapaian rencana aksi

Tabel 3.8
capaian kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Pelaporan kinerja	Nilai	120	20	20,95	100%

Berdasarkan tabel diatas nilai pelaporan kinerja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi tim Inspektorat Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada tahun 2020, Inspektorat mendapatkan nilai 20,95 dari target 20 atau dengan capaian 100% dalam kategori "**Sangat Tinggi**".

6. Indikator Nilai Pelaporan Kinerja

Lakip Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi tim Inspektorat Kabupaten Balangan yang dilaksanakan pada tahun 2021, Inspektorat mendapatkan predikat BB pada angka 73,03. Jika dilihat capaian pada tahun sebelumnya nilai Sakip Inspektorat mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu capaiannya sebesar 102% atau dalam kategori "**Sangat Tinggi**".

Tabel 3.9
capaian kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Pelaporan kinerja	Nilai	97%	BB = 71	BB (73,03)	102%

Capaian Sasaran Program Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III

Pada Inspektorat Kabupaten Balangan berdasarkan struktur organisasi tidak memiliki unsur bidang teknis, tetapi Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III. Inspektur Pembantu Wilayah memiliki wilayah binaan yang terdiri dari beberapa SKPD, Kecamatan dan Desa.

Berikut ini merupakan Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Wilayah I, II & III pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.10
capaian kinerja sasaran program
Eselon Inspektur Pembantu Wilayah I,II dan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD lingkungan Pemerintah Daerah	Presentase SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertibevaluasi SAKIP	100 %	80 %	80 %	100 %
2	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP	% SKPD menindaklanjuti rekomendasi	100 %	100 %	100 %	100 %

		evaluasi SAKIP				
3	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	jumlah LHP yang selesai tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Level Maturitas SPIP SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil QA	-	4	0	0

Analisis capaian kinerja sasaran program Inspektur Pembantu Wilayah :

1. Indikator Presentase SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib evaluasi SAKIP capaian kinerja sebesar 100 % dari target 80 % realisasi 100 %
2. Indikator % SKPD menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP capaian kinerja 100 % dari target 100 % realisasi 100 %
3. Indikator jumlah LHP yang selesai tepat waktu yaitu Laporan Hasil Pengawasan atas Pengaduan masyarakat dari 4 pengaduan telah diselesaikan laporan hasil pengawasannya atau capaian sebesar 100 % dari target 100 % realisasi 100 %
4. Indikator Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil QA capaian kinerja 0 % dari target 4 SKPD yang per wilayah binaan yang di QA Maturitas SPIP akan tetapi pada tahun 2020 Inspektorat Balangan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan melaksanakan asistensi penyusunan profil risiko SKPD, dimana profil risiko ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian Kinerja sasaran kegiatan yaitu eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat

Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
capaian kinerja sasaran kegiatan untuk Eselon IV
Kasubbag Perencanaan dan keuangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Satuan	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya monitoring SKPD / Desa	Jumlah SKPD / Desa yang melaksanakan TLHP	78%	%	95	80	84
2	Terlaksananya evaluasi SAKIP di lingkungan SKPD	Jumlah SKPD yang dievaluasi tepat waktu	100 %	Jumlah	41	41	100
3	Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemda Balangan	Jumlah LHP	60 %	Laporan	10	4	40

4	Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal	Persentase obrik yang selesai TLHP	93 %	%	95	87	91
5	Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal	Persentase obrik yang selesai TLHP	94 %	%	95	90	94
6	Jumlah dokumen perencanaan	jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra & Renja)	100 %	Dokumen	2	2	100
7	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)	100 %	Dokumen	1	1	100
8	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	100 %	Dokumen	1	1	100

Analisis capaian kinerja sasaran kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :

1. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah SKPD / Desa yang melaksanakan TLHP sebesar 95 % dari target 80 % realisasi 84 %. Pada tahun 2020 SKPD/ Desa yang menjadi obyek pemeriksaan APIP sebanyak 6 Obrik yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari jumlah Obrik 11. Sedangkan untuk TLHP BPK RI Tahun 2021 terdapat 24 SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan, sebanyak 22 SKPD telah menyelesaikan Tindak lanjut.
2. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah SKPD yang dievaluasi tepat waktu sebesar 100 %, dimana pada tahun 2021 seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Balangan telah dievaluasi SAKIP.
3. Capaian kinerja untuk penanganan pengaduan masyarakat sebesar 40 % yaitu dari 4 pengaduan telah diselesaikan laporan hasil pengawasannya dari target 10 kasus.
4. Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal sebesar 95 % dari target 87 % realisasi 91%.
5. Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal sebesar 95 % dari target 90 % realisasi 94 %.
6. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah dokumen perencanaan sebesar 100 %, pada tahun 2021 telah tersusun 2 dokumen perencanaan yaitu Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan tahun 2021.
7. Capaian kinerja Jumlah dokumen pelaporan kinerja sebesar 100 % yaitu telah tersusun dokumen LKj Inspektorat Tahun 2020.
8. Capaian kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sebesar 100 %, pada tahun 2021 telah tersusun satu dokumen laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2020.

Capaian Kinerja sasaran kegiatan yaitu eselon IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja sasaran kegiatan yaitu eselon IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Satuan	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Terbentuknya Unit Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	100 %	%	100 %	100 %	100 %
2	Terlaksananya asistensi identifikasi dan analisis risiko SKPD	Level SPIP	100 %	Level	3	3	100 %
3	Terlaksananya self assesment kapabilitas APIP bersama BPKP Provinsi	Level APIP	100 %	Level	3	3	100 %
4	Merencanakan dan mengadakan sarpras administrasi	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara	100 %	%	100	100	100 %

	perkantoran	tertib					
	dan	Jumlah laporan					
	kepegawaian	aset yang dibuat	100 %	dokumen	1	1	100 %
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	100 %	%	100	100	100

Analisis capaian kinerja sasaran kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian :

1. Capaian Jumlah pengaduan yang tertangani adalah 100 % dari target 100 % realisasi 100 %.
Pada tahun 2021 Tim Sekretariat Pengaduan Masyarakat menerima pengaduan 4 kasus.
2. Capaian indikator Level SPIP sebesar 100 % dari target level 3 realisasi level 3
3. Capaian indikator level Kapabilitas APIP sebesar 100 % yati dari target level 3 realisasi level 3
4. Capaian indikator Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib adalah 100 % yaitu dari target 100 % realisasi 100 %
5. Capaian indikator Jumlah laporan aset yang dibuat sebesar 100 % dari target 100 % realisasi 100 % yaitu tersusunnya dokumen laporan Aset
6. Capaian Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat sebesar 100 % dari target 100 % realisasi 100 %

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah beberapa program tahun 2021 periode RENSTRA 2016-2021. Program dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2021 periode RPJMD 2016-2021 terdiri dari 3 Program, 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Balangan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp.9.641.353.000,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi : Rp. 8.681.398.200,00
- b. Belanja Modal : Rp. 959.954.800,00

Realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.669.817.569,00 atau 89% dari pagu sebesar Rp. 9.641.353.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut:

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	7.535.935.000,-	6.991.023.151,-	92,77
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	55.275.000,-	34.791.000,-	62,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	14.250.000,-	7.700.000,-	54,04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	18.525.000,-	6.391.000,-	34,5

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.500.000,-	20.700.000,-	92
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.180.380.000,-	4.102.961.413,-	98,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.173.955.000,-	4.101.086.413,-	98,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.425.000,-	1.875.000,-	29,18
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		815.760.000,-	582.627.000,-	71,42
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		52.500.000,-	52.500.000,-	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		331.260.000,-	287.218.400,-	86,7
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		432.000.000,-	242.908.600,-	56,23
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		974.076.325,-	901.061.209	92,5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		56.807.600,-	30.950.000,-	54,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.843.725,-	8.843.725,-	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		9.840.000,-	6.360.000,-	64,63
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan		214.050.000,-	207.975.000,-	97,16

kantor				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		684.535.000,-	646.932.484,-	95
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		340.320.875,-	255.806.369,-	75,17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.150.000,-	3.674.500,-	71,35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		116.400.000,-	103.625.385,-	89,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		218.770.875,-	148.506.484,-	67,88
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kebijakan KDH		750.854.800,-	746.330.000,-	99,4
bangunan lainnya		750.854.800,-	746.330.000,-	99,4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		419.268.000,-	367.446.160,-	87,64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		133.768.000,-	121.660.642,-	90,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		285.500.000,-	245.785.518,-	86,09

Tabel 3.13
Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2020

Saran Perbaikan :	
1.	Melakukan monitoring terhadap capaian target jangka menengah yang ada dalam Renstra
2.	Memfaatkan perencanaan kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran
3.	Memfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment
4.	Memfaatkan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk penilaian kinerja (reward & punishment)
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata yaitu melakukan monev setiap triwulan
6.	Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mampu meningkatkan kualitas pencapaian kinerja organisasi



Tindak Lanjut :	
1.	Melaksanakan monitoring terhadap capaian target menengah yang ada di RENSTRA
2.	Penyusunan anggaran berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun
3.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Indikator Kinerja dan melaporkan secara berkala kepada Pimpinan
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat struktural terkait capaian kinerja sebagai bentuk keterlibatan Inspektur terhadap implementasi SAKIP Inspektorat

3.2 Akuntabilitas Kinerja Berbasis Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026

A. Capaian Kinerja Inspektorat

Laporan Capaian Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021 periode RENSTRA 2021-2026 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama RENSTRA periode 2021-2026. Tujuan Inspektorat Kabupaten Balangan yang tertera pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN”* memiliki indikator tujuan Indeks Integritas.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja akhir RENSTRA 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Tujuan dan Indikator Tujuan Akhir RENSTRA 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Indeks Integritas	Indeks	78	76,52	98	Sangat Tinggi

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran tahun pertama RENSTRA di tahun 2021 bulan September sampai desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Utama (Eselon II) Inspektorat Kabupaten Balangan

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama / Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMD Kab/Kota	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN	Kategori
				Target	Realisasi	Capaian						
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Indeks Integritas	77,28	78	76,52	98	82	93	93	-	-	Sangat Tinggi
		Level maturitas SPIP	Level 3 (3,023)II	Level 3 (3,023)	Level 3 (3,023)	100	Level 3 (3,2)	94	94	-	-	Sangat Tinggi
		Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	Level 3	100	100	-	100	Sangat Tinggi

		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	-	WBK 1 WBBM 1	0	0	WBK 6 WBBM 6	0	0	-	-	Sangat rendah
2	Meningkatnya kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	85	75	89	119	85	104	104	-	-	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa indikator kinerja jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM capaiannya masih sangat rendah, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya capaian kinerja sangat tinggi. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja eselon II :

1. Sasaran Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif

1.1 Indikator Indeks Integritas

Nilai Indeks Integritas Kabupaten Balangan Tahun 2021 adalah 76,52 dari target 78 atau capaian 98% atau dalam kategori **Sangat Tinggi**. Indeks Integritas kabupaten Balangan mengalami penurunan dari tahun 2020 dimana indeks tahun 2020 adalah 77,28. Berdasarkan rekomendasi dari KPK untuk Kabupaten Balangan agar dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan Korupsi dalam rangka meningkatkan integritas adalah sebagai berikut :

- a. penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
- c. pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
- d. perdagangan pengaruh (trading in influence) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain

itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

- e. optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel

1.2 Indikator Level Maturitas SPIP

Berdasarkan dari Laporan Hasil QA (Quality Assurance) oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor LQA-416/PW16/3/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,023, dimana target pada tahun 2021 level 3 (3,023) atau capaian 100 % dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2021 masih menggunakan hasil penilaian tahun 2018 karena sampai dengan laporan ini disusun belum dilaksanakan lagi penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Dalam rangka penguatan Level maturitas SPIP Inspektorat telah melaksanakan Asistensi penyusunan profil risiko kepada seluruh unit kerja/SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2021.

1.3 Indikator Level kapabilitas APIP

Pada tahun 2021 target Level kapabilitas APIP level 3 realisasi level 3 dengan capaian 100% atau dalam kategori **Sangat Tinggi**. Berdasarkan Hasil Laporan QA BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor SP-267/D3/04/2020 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Balangan

tanggal 5 Maret 2020 menyatakan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Balangan telah berada di level 3 untuk semua elemen, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Penilaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

1.4 Indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Pada tahun 2021 Indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM target WBK 1 WBBM 1, realisasi WBK 0 WBBM 0 capaian 0%. Capaian penilaian indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam kategori **Sangat Rendah**. Pada tahun 2021 terdapat 3 unit kerja pelayanan yang diusulkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yaitu, RSUD, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akan tetapi hasilnya ketiga unit kerja tersebut belum memenuhi kriteria evaluasi penilaian WBK WBBM.

Berdasarkan surat dari Kementrian Peberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/143/PW.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Hasil Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM belum mengalami perkembangan signifikan yang ditandai belum ada unit kerja yang lolos meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2021. Perbaikan terhadap integritas dan Kualitas Layanan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan.

Beberapa catatan atas hasil Evaluasi tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Unit kerja yang diusulkan belum cukup memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal tersebut mengakibatkan strategi yang dilakukan belum sepenuhnya mendukung unit kerja dalam mencapai kinerja yang lebih baik.
- b. Komitmen dalam membangun Zona Integritas pada unit kerja belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik, hal ini dikarenakan belum meratanya pemahaman Pimpinan dan pegawai unit kerja terkait substansi area-area perubahan dalam membangun Zona Integritas.
- c. Sebagian besar unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnisnya dengan menyesuaikan dengan isu strategis yang dimiliki dan terus berupaya membangun berbagai macam inovasi. Namun inovasi yang dibangun belum cukup memberikan dampak peningkatan pencapaian target kinerja yang lebih baik, menjawab isu strategis yang dimiliki oleh setiap unit kerja, maupun menjawab kebutuhan dari stakeholder yang menerima layanan.
- d. Unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik dan belum cukup mengenali serta memahami berbagai risiko penyebab risiko kegagalan pencapaian kinerja. Selain itu, unit kerja juga belum mengidentifikasi risiko dan potensi terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak negative terhadap integritas.
- e. Implementasi sistem pengawasan yang dilakukan masih bersifat public campaign dan belum dilakukan secara sistematis
- f. Unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya mampu menyampaikan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan. Sehingga pengguna layanan belum merasakan perubahan yang dilakukan unit kerja yang dibuktikan seluruh unit kerja yang diusulkan tidak memenuhi jumlah responden minimal survey

- g. Inspektorat maupun Tim Penilai Internal yang dibentuk belum optimal dalam membina dan mengawal pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja sehingga masih perlu perbaikan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja.

Saran perbaikan dari Kementerian PAN&RB atas catatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong Bappeda dan Inspektorat untuk mereviu secara berkala definisi dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja serta memastikan bahwa seluruh unit kerja mampu memahami kinerja dan tujuan adanya setiap unit kerja. Hal tersebut diharapkan agar seluruh unit kerja mampu memahami kinerja dan target yang akan dicapai untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
- b) Meningkatkan pemerataan internalisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala kepada seluruh pimpinan dan pegawai diseluruh unit kerja serta menciptakan melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan unit kerja dengan seluruh pegawai secara berjenjang yang bervokus pada sharing vision baik terkait isu strategis unit kerja maupun pembangunan Zona Integritas pada seluruh tingkatan organisasi.
- c) Mendorong unit kerja untuk terus menciptakan inovasi yang mampu menjawab isu strategis setiap unit kerja serta melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dan kebermanfaatan seluruh inovasi yang ada, sehingga inovasi tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja, kebutuhan pengguna layanan dan pengawasan integritas.
- d) Membangu penerapan manajemen risiko yang baik, diawali dengan mengenali potensi risiko kegagalan, menyusun peta risiko dan rencana mitigasinya, serta diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan disetiap unit kerja. Selain itu, diharapkan juga unit kerja terkait agar mendorong peningkatan pemahaman seluruh pegawai terkait risiko yang mungkin terjadi pada unit kerja, mitigasi dan pengendaliannya, sehingga

seluruh bagian dalam unit kerja dapat berperan aktif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mempengaruhi integritas.

- e) Mengoptimalkan pengeimplementasian sistem pengawasan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan gratifikasi, pengawasan internal, pengaduan masyarakat, whistleblowing, dan benturan kepentingan guna mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas KKN.
- f) Memperbaiki dan menyusun strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas.
- g) Meningkatkan kapasitas Inspektorat maupun Tim Penilai Internal dengan melakukan Benchmark kepada instansi yang telah sukses dalam mengawal pembangunan zona integritas dan membina serta mengawal pembangunan zona integritas secara berkala kepada seluruh unit kerja sehingga kedepan diharapkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

2. Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan

2.1 Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pada Tahun 2021 untuk Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan realisasi sebesar 89% dari target tahun 2021 sebesar 75% atau dengan capaian 119% dalam kategori **Sangat Tinggi**. Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ini terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP) dan kegiatan Tindak Lanjut Hasil pengawasan Eksternal (BPK RI). Dimana pada tahun 2021 untuk kegiatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan internal (APIP) terdapat 87 rekomendasi dan 80 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti atau dengan capaian 92%. Sedangkan berdasarkan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (BPK RI) sampai dengan pada tahun 2021 terdapat 756 rekomendasi dan sebanyak 656 rekomendasi telah

selesai ditindaklanjuti atau dengan capaian 87 %. Berikut ini rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan :

Tabel 3.17

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah	
	Jml	Nilai		Jml	Nilai		Sesuai			Belum Sesuai			Belum Ditindaklanjuti				Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2005	19	IDR 751,965,514.79	20	IDR 751,965,514.79	20	IDR 751,965,514.79	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 751,965,514.79				
2006	16	IDR 1,740,612,184.50	32	IDR 1,740,612,184.50	32	IDR 1,740,612,184.50	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,740,612,184.50				
2007	28	IDR 308,387,209.00	44	IDR 308,387,209.00	43	IDR 308,387,209.00	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 308,387,209.00				
2008	32	IDR 216,281,900.00	60	IDR 216,281,900.00	60	IDR 216,281,900.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 220,031,900.00				
2009	42	IDR 281,670,215.50	75	IDR 281,670,215.50	74	IDR 281,670,215.50	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 256,266,215.50				
2010	15	IDR 132,868,862.04	35	IDR 132,868,862.04	35	IDR 132,868,862.04	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 132,868,862.04				
2011	24	IDR 668,403,644.49	54	IDR 668,403,644.49	50	IDR 668,403,644.49	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	3	IDR 0.00	IDR 668,403,644.49				
2012	20	IDR 59,338,194.03	46	IDR 59,338,194.03	45	IDR 59,338,194.03	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 479,924,150.00				
2013	21	IDR 1,072,609,104.01	42	IDR 143,318,237.00	41	IDR 143,318,237.00	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 305,425,582.88				
2014	12	IDR 388,848,442.64	26	IDR 117,176,140.00	25	IDR 117,176,140.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	1	IDR 0.00	IDR 250,813,242.64				
2015	8	IDR 577,708,026.63	19	IDR 137,500,000.00	17	IDR 0.00	0	IDR 137,500,000.00	0	IDR 0.00	2	IDR 0.00	IDR 440,208,026.63				
2016	12	IDR 2,191,561,708.55	30	IDR 22,324,550.00	25	IDR 0.00	5	IDR 22,324,550.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 2,169,057,213.03				
2017	14	IDR 236,000,000.00	49	IDR 236,000,000.00	29	IDR 0.00	20	IDR 236,000,000.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00					
2018	20	IDR 2,668,480,559.48	49	IDR 886,901,637.45	42	IDR 886,901,637.45	7	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,635,198,855.03				
2019	24	IDR 1,626,537,538.93	75	IDR 226,662,441.98	63	IDR 218,966,584.98	11	IDR 7,695,857.00	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,684,527,107.46				
2020	15	IDR 433,787,211.97	47	0	32		14		1		0		IDR 433,787,211.97				
2021	20	IDR 2,017,091,293.43	53	IDR 585,912,389.62	23	IDR 67,438,181.81	26	IDR 518,474,207.81	4	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 1,431,178,903.81				
Jumlah	342	IDR 15,372,151,609.99	756	IDR 6,515,323,120.40	656	IDR 5,593,328,505.59	88	IDR 921,994,614.81	6	IDR 0.00	6	IDR 0.00	IDR 12,908,655,823.77				

Tabel 3.18
REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
TAHUN 2021

NO	OBJEK	JML	JML	JML	KATEGORI					
	PEMERIKSAAN	LHP	TEMUAN	REKOMENDASI	S	%	D	%	B	%
1	2	3	15	30	40	41	42	43	44	45
1	Desa Halubau	1	5	9	9	100		0	0	0
2	Desa Mundar	1	8	19	13	68.42		0	6	31.6
3	Desa Hujan Mas	1	6	12	12	100		0	0	0
4	Desa Murung Abuin	1	4	8	7	87.5		0	1	12.5
5	Desa Kasai	1	7	16	16	100		0	0	0
6	Desa Gunung Manau	1	4	7	7	100		0	0	0
7	DPMD	1	2	6	6	100		0	0	0
8	DPMPTSP	1	3	10	10	100		0	0	0
	SUB JUMLAH	8	39	87	80	91.95	0	0	7	8.05
Keterangan:		:								
Jumlah Temuan		:	39							
Jumlah Rekomendasi		:	87							
Rekomendasi Selesai		:								
Ditindaklanjuti		:	80							
Persentase Rekomendasi		:								
Ditindaklanjuti		:	91.95402							

2) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.19
capaian kinerja sasaran program Sekretaris

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	97%	BB (71)	BB (73,03)	102%
2	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Inspektorat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase SDM Inspektorat Daerah yang bersertifikat sesuai keahlian	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Persentase Pemenuhan elemen penilaian mandiri kapabilitas APIP	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan	-	75%	89%	119%

3) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Irbanwil I Inspektorat Kabupaten Balangan

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.20
capaian kinerja sasaran Irbanwil I

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	-	60 %	42,85%	71%
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	-	50%	100%	200%
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan	-	75%	100%	133%
		persentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I

1. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan pada tahun 2021 realisasi sebesar 42,85% dari target 60% dengan capaian 71%. SKPD Binaan diwilayah Irbanwil I sebanyak 14 SKPD, berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 terdapat 8 SKPD yang mendapat temuan dan 6 SKPD yang bebas temuan pemeriksaan.

2. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal pada tahun 2021 target 50% realisasi 100% capaian 200%. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020, SKPD diwilayah Irbanwil I tidak terdapat temuan keuangan.
3. Indikator Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan pada tahun 2021 target 75% realisasi 100% dengan capaian sebesar 133%. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP, SKPD di wilayah Irbanwil I telah menyelesaikan tindak lanjut Hasil pengawasan.
4. Indikator presentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku target pada tahun 2021 sebesar 100% realisasi 100% dengan capaian 100%. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan asistensi penyusunan profil risiko diseluruh SKPD binaan Inspektur Pembantu Wilayah I.

4) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Irbanwil II Inspektorat Kabupaten Balangan

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.21
capaian kinerja sasaran Irbanwil II

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	-	60 %	57,14%	95%
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	-	50%	85%	170%
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan	-	75%	66%	88%
		prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II

1. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan pada tahun 2021 realisasi sebesar 57,14% dari target 60% dengan capaian 95%. SKPD Binaan diwilayah Irbanwil II sebanyak 14 SKPD, berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 terdapat 6 SKPD yang mendapat temuan dan 8 SKPD yang bebas temuan pemeriksaan.
2. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal pada tahun 2021 target 50% realisasi 85% capaian 170%. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020, SKPD diwilayah Irbanwil II terdapat 2 SKPD yang memndapat temuan finansial yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, sehingga terdapat 12 SKPD yang bebas temuan finansial.
3. Indikator Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan pada tahun 2021 target 75% realisasi 66% dengan capaian sebesar 88%. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP, SKPD di wilayah Irbanwil II terdapat 3 Obyek Pemeriksaan dimana 2 Obrik telah menyelesaikan tindak lanjut dan 1 Obrik masih dalam proses penyelesaian temuan.
4. Indikator prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku target pada tahun 2021 sebesar 100% realisasi 100% dengan capaian 100%. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan asistensi penyusunan profil risiko diseluruh SKPD binaan Inspektur Pembantu Wilayah II.

5) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Irbanwil III Inspektorat Kabupaten Balangan

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.22
capaian kinerja sasaran Irbanwil III

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	-	60 %	35,17%	58%
		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	-	50%	78%	156%
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan	-	75%	50%	66%
		prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah III

1. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan pada tahun 2021 realisasi sebesar 35,17% dari target 60% dengan capaian 58%. SKPD Binaan diwilayah Irbanwil III sebanyak 14 SKPD, berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 terdapat 9 SKPD yang mendapat temuan dan 5 SKPD yang bebas temuan pemeriksaan.
2. Indikator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal pada tahun 2021 target 50% realisasi 78% capaian 156%. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan BPK RI atas LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020, SKPD diwilayah Irbanwil III terdapat 3 SKPD yang mendapat temuan finansial yaitu Dinas PUPR, Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian, sehingga terdapat 11 SKPD yang bebas temuan finansial.
3. Indikator Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi pengawasan dengan kategori selesai/tuntas sesuai wilayah binaan pada tahun 2021 target 75% realisasi 50% dengan capaian sebesar 66%. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP, SKPD di wilayah Irbanwil III terdapat 2 Obyek Pemeriksaan dimana 1 Obrik telah menyelesaikan tindak lanjut dan 1 Obrik masih dalam proses penyelesaian temuan.
4. Indikator prestase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku target pada tahun 2021 sebesar 100% realisasi 100% dengan capaian 100%. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan asistensi penyusunan profil risiko diseluruh SKPD binaan Inspektur Pembantu Wilayah III.

6) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Balangan

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.23
capaian kinerja sasaran Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan		100%	100%	100%
		Persentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan		100%	100%	100%
		Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM		WBBM :2 WBK :1	WBBM :2 WBK :1	100%
		Nilai PMPRB		70	75.63	108%
		Persentase Pencapaian Indikator MCP		75%	83,91%	110%
		Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB		45%	43%	95%

Analisis capaian kinerja Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi

1. Indikator Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan target tahun 2021 100% realisasi 100% capaian 100%. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan audit dengan tujuan tertentu terkait penanganan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 4 kasus pengaduan.
2. Indikator Persentase Aduan Masyarakat yang terselesaikan target 100% realisasi 100% dengan capaian 100%. Pada tahun 2021 telah menerima 4 pengaduan dan telah ditangani dengan output 4 Laporan Hasil Investigasi.
3. Indikator Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM pada tahun 2021 target WBK 1 WBBM 2 realisasi 100 % capaian 100%. Pada tahun 2021 telah diusulkan 2 unit kerja Zona Integritas menuju WBBM yaitu RSUD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 1 unit kerja diusulkan Zona Integritas menuju WBK yaitu Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Indikator PMPRB target 75 realisasi 75,63 capaian 108%. Pada Tahun 2021 telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebanyak 13 SKPD dilaksanakan penilaian RB dan diantara 13 SKPD tersebut sebanyak 10 SKPD yang menjadi sample pengisian dalam PMPRB online 2021.
5. Indikator Persentase Pencapaian Indikator MCP target tahun 2021 75 realisasi 83,91 capaian 110%. Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2021 terdapat 8 area intervensi yaitu Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD dengan capaian 94,34, Area Intervensi Pengadaan Barang & Jasa dengan capaian 81,35, Area Intervensi Perizinan dengan capaian 94,38, Area Intervensi Manajemen ASN dengan capaian 81,51, Area Intervensi Pengawasan APIP dengan capaian 79,94, Area Intervensi Optimalisasi Pajak Daerah dengan capaian 87,66, Area Intervensi Manajemen Aset Daerah dengan capaian 72,48, Area intervensi Tata Kelola Keuangan Desa dengan capaian 75,25.
6. Indikator Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB target pada tahun 2021 45% realisasi 43% capaian 95%. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2020 pada seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Balangan dengan hasil penilaian 18 SKPD mendapatkan hasil evaluasi SAKIP dengan nilai BB, 18 SKPD mendapatkan hasil evaluasi SAKIP dengan nilai B, dan terdapat 5 SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP dengan nilai CC.

7) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Inspektur Pembantu Investigasi, RB dan Koordinator Pencegahan Korupsi pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.24
capaian kinerja sasaran Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Laporan Kinerja yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Laporan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	75%	89%	119%

Analisis capaian kinerja Kasubbag Perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik target 100% realisasi 100% capaian 100%. Pada tahun 2021 telah tersusunnya laporan capaian kinerja tahun 2020 dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD per periodik yang disusun per triwulan.
2. Indikator Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik target 100% realisasi 100% capaian 100%. Pada tahun 2021 telah tersusun dokumen perencanaan Inspektorat yaitu Renja Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021 beserta Renstra Periode 2021-2026.
3. Indikator Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan target 100% realisasi 100% capaian 100%. Pada tahun 2021 telah tersusun laporan keuangan Inspektorat tahun 2020 yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Indikator Persentasi Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik target 100% realisasi 100% capaian 100%. Pada tahun 2021 telah tersusun laporan evaluasi kinerja Inspektorat yang disusun per triwulan.
5. Indikator Prestase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan target 75% realisasi 89% capaian 119%. Pada tahun 2021 Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ini terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP) dan kegiatan Tindak Lanjut Hasil pengawasan Eksternal (BPK RI). Dimana pada tahun 2021 untuk kegiatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan internal (APIP) terdapat 87 rekomendasi dan 80 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti atau dengan capaian 92%. Sedangkan berdasarkan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (BPK RI) sampai dengan pada tahun 2021 terdapat 756 rekomendasi dan sebanyak 656 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti atau dengan capaian 87 %. Berikut ini rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

8) Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Balangan :

Tabel 3.25
capaian kinerja sasaran Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Kinerja Utama (Sasaran)	Indikator Kinerja Utama (Sasaran)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	-	100%	100%	100%
		Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%
2	Tersedianya data kepegawaian	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS	-	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas SDM	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	100%	100%
4	Terlaksananya pengelolaan BMD secara tertib	Jumlah Laporan Pencatatan Aset	-	1 Dok	1 Dok	100%
5	Tersedianya Laporan Aset	Persentase Penyampaian Laporan Aset tepat waktu.	-	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Kasubbag Perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU target 100% realisasi pada tahun 2021 100% dengan capaian 100%.

2. Indikator Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan target 100% realisasi pada tahun 2021 100% dengan capaian 100%
3. Indikator Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS target 100% realisasi pada tahun 2021 100% dengan capaian 100%
4. Indikator Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah target 100% realisasi pada tahun 2021 100% dengan capaian 100%
5. Indikator Jumlah Laporan Pencatatan Aset target pada tahun 2021 1 dokumen realisasi telah tersusunnya dokumen laporan pencatatan asset Inspektorat tahun 2021 atau dengan capaian 100%
6. Indikator Persentase Penyampaian Laporan Aset tepat waktu target pada tahun 2021 100% realisasi 100% dengan capaian 100%

BAB IV

PENUTUP

A. Periode RENSTRA Tahun 2016-2021

Realisasi Indikator Tujuan dalam dokumen Renstra 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana tabulasi data berikut:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik	95	-	-	5	60	75	87

Berdasarkan tabel diatas Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan periode 2016-2021 memiliki 1 indikator tujuan yaitu persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja baik belum memenuhi target akhir Renstra, dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 87%.

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra 2021	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	50%	-	-	-	0	10%	45%

2	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan	% Rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	95%	-	-	11%	69%	90%	90%
		% Rekomendasi pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	-	-	84,41%	87,82	89%	87%
3	Meningkatnya kualitas implementasi pengawasan internal	Prosentase SKPD dengan hasil QA Maturitas SPIP minimal level 3	29%	-	-	-	-	-	-
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	-	-	CC (53,24)	B (63,09)	B (69,11)	BB (73,03)
		Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Periode RENSTRA Tahun 2021-2026

Realisasi Indikator Tujuan dalam dokumen Renstra 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana tabulasi data berikut:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Akhir Renstra	Kategori
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN	Indeks Integritas	Indeks	78	76,52	82	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas Renstra Inspektorat Kabupaten Balangan periode 2021-2026 memiliki 1 indikator tujuan yaitu Indeks Integritas, target pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 78, realisasi sebesar 76,52 atau capaian kinerja dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Kategori
1	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Level maturitas SPIP	Level	3 (3,023)	3 (3,023)	100%	Sangat Tinggi
		Level kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	Sangat Tinggi
		Indeks	Indeks	78	76,52	98%	Sangat

		Integritas					Tinggi
		Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Jumlah	WBK 1 WBBM 1	WBK 0 WBBM 0	0	Sangat Rendah
2	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Persentase	75%	89%	119%	Sangat Tinggi

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Inspektorat telah dicapai yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Terdapat 4 (empat) indikator berkategori sangat tinggi yakni indikator Level Maturitas SPIP dengan capaian 100%; Level Kapabilitas APIP dengan capaian 100%; Indeks Integritas dengan capaian 98%; dan Prosentase penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pengawasan dengan capaian 119%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi atau dalam kategori sangat rendah yaitu indikator jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.

C. Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi

Inspektorat Kabupaten Balangan telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Implementasi SAKIP Berdasarkan LHE Inspektorat Nomor:700/156/LHE SAKIP/INSPEKTORAT-BLG/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan memperoleh nilai 73,03 atau dengan predikat BB. Adapun beberapa rencana aksi atas perbaikan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring terhadap capaian target menengah yang ada di RENSTRA
2. Menyusun anggaran dengan memperhatikan perencanaan kinerja yang telah disusun

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Indikator Kinerja dan melaporkan secara berkala kepada Pimpinan
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat struktural terkait capaian kinerja sebagai bentuk keterlibatan Inspektur terhadap implementasi SAKIP Inspektorat